



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2014

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2014, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang

- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah

- Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
  37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
  38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

- Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
  40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga

- Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
  42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
  43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
  44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
  45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
  46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012);  
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi
48. dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 767.710.437.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 138.027.963.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 905.738.400.000,00 (sembilan ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	643.028.274.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>70.429.717.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	713.457.991.000,00
2. Belanja Daerah:		
a. Semula	Rp	767.710.437.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>138.027.963.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>905.738.400.000,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	<u>(192.280.409.000,00)</u>

3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	126.682.163.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>70.482.156.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	197.164.319.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.883.910.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>4.883.910.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah Perubahan	Rp	<u>192.280.409.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	92.131.839.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>22.649.908.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	114.781.747.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	450.465.060.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>623.488.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	451.088.548.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	100.431.375.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>47.156.321.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	147.587.696.000,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	25.400.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>3.468.669.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	28.868.669.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	10.457.340.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>383.996.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	10.841.336.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	4.140.179.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>51.340.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	4.191.519.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	52.134.320.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>18.745.903.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	70.880.223.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp	19.324.667.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>623.488.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp	19.948.155.000,00

b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp	399.083.343.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	399.083.343.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp	32.057.050.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	32.057.050.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:		
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1) Semula	Rp	24.195.838.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>14.319.907.000,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp	38.515.745.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi		
	1) Semula	Rp	53.906.187.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>19.757.078.000,00</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan	Rp	73.663.265.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	22.329.350.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>13.079.336.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	35.408.686.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	381.425.339.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>62.921.827.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	444.347.166.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp	386.285.098.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>75.106.136.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	461.391.234.000,00
(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	359.975.174.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>47.913.211.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	407.888.385.000,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00

c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp	17.250.165.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.900.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	19.150.165.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp	800.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>200.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp	900.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	900.000.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>12.908.616.000,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	15.408.616.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	42.558.881.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.462.351.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	44.021.232.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	158.398.633.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>23.793.637.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	182.192.270.000,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	185.327.584.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>49.850.148.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	235.177.732.000,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	126.682.163.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>70.482.156.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	197.164.319.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.883.910.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	4.883.910.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp	126.682.163.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>70.482.156.000,00</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	197.164.319.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00

f.	Penerimaan	Piutang		
	Daerah			
	1) Semula		Rp	0,00
	2) Bertambah		Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah	Penerimaan		
	Piutang	Daerah	setelah	
	Perubahan		Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf			
	b, terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan	Dana		
	Cadangan			
	1) Semula		Rp	0,00
	2) Bertambah		Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah	Pembentukan		
	Dana	Cadangan	setelah	
	Perubahan		Rp	0,00
b.	Penyertaan	Modal		
	(Investasi)	Pemerintah		
	Daerah			
	1) Semula		Rp	2.000.000.000,00
	2) Bertambah		Rp	<u>2.872.950.000,00</u>
	Jumlah	Penyertaan	Modal	
	(Investasi)	Pemerintah		
	Daerah	setelah	Perubahan	
			Rp	4.872.950.000.00
c.	Pembayaran	Cicilan	Pokok	
	Utang			
	1) Semula		Rp	0,00
	2) Bertambah		Rp	<u>10.960.000,00</u>
	Jumlah	Pembayaran		
	Cicilan	Pokok	Utang	
	setelah	Perubahan		
			Rp	10.960.000,00

d. Pemberian Daerah	Pinjaman		
1) Semula		Rp	0,00
2) Bertambah		Rp	0,00
Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Pemberian Daerah	Rp	0,00

#### Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;



- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dengan Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 30 Oktober 2014

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 30 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014  
NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (214/2014).